

MODEL-MODEL INOVASI KURIKULUM: KBM, KTSP, K13, DAN KURIKULUM MERDEKA

Nur Shaumi Aziza

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: nurshaumiaziza@gmail.com

Abstrak

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan keniscayaan sebagai upaya adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Studi ini ditujukan untuk memaparkan alur sejarah serta dinamika perubahan dari model inovasi kurikulum di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan teknik model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kurikulum di Indonesia telah berevolusi dari orientasi pembentukan karakter bangsa pascake merdeka (Rentjana Pelajaran 1947), penguatan manajemen instruksional (Kurikulum 1975 dan 1984), sinkronisasi dunia kerja melalui Link and Match (Kurikulum 1994), hingga penekanan pada standar kompetensi (KBK 2004 dan KTSP 2006). Transformasi berlanjut pada Kurikulum 2013 yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik. Terakhir, Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi mutakhir yang memberikan fleksibilitas tinggi, fokus pada materi esensial, dan otonomi luas bagi satuan pendidikan termasuk madrasah untuk mengembangkan potensi unik peserta didik demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa setiap model inovasi kurikulum memiliki karakteristik yang spesifik guna menjawab tantangan zamannya masing-masing dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kata Kunci: Inovasi, Kurikulum, Sejarah Pendidikan.

Abstract

Curriculum revolution in Indonesia is an inevitability as an adaptive effort toward the development of science, technology, and the demands of societal needs. This study aims to describe the history of development and the transformation of curriculum innovation models in Indonesia, covering historical developments from colonial governance to modern Merdeka Curriculum reforms. The method employed is descriptive qualitative research with a library research approach. The analytical framework by Miles and Huberman was utilized in this study, comprising data reduction, data presentation through comparative matrices, and drawing conclusions. The results indicate that curriculum innovation in Indonesia has evolved from an orientation toward post-independence national character building (1947 Lesson Plan), the strengthening of instructional management (1975 and 1984 Curricula), and the synchronization with the workforce through Link and Match (1994 Curriculum), to an emphasis on competency standards (2004 Competency-Based Curriculum and 2006 KTSP). This transformation continued with the 2013 Curriculum, which integrated character education with a scientific approach. Finally, the Merdeka Curriculum emerged as a cutting-edge innovation providing high flexibility, a focus on essential materials, and broad autonomy for educational units, including madrasahs, to develop the unique potential of students in order to realize the Pancasila Student Profile. The conclusion of this study confirms that each

curriculum innovation model possesses specific characteristics to address the challenges of its respective era in improving the quality of national education.

Keywords: *Innovation, Curriculum, Education History.*

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan hak dan jaminan Pendidikan dari negara. Prinsip ini merujuk pada regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 Ayat 1 dan 2 dimana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur oleh undang-undang (UUD 1945). Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta perlakuan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU 2003).

Pendidikan sendiri memiliki arti sebagai pengalaman belajar yang terjadi dalam lingkungan dan dialami sepanjang hidup seseorang. Pendidikan juga merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi perkembangan kualitas hidup (Mudyahardjo, 2006: 3). Tujuan Pendidikan menurut Ahdar (2021, 51) yaitu sesuatu yang terkandung dalam setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar, tumbuh, tidak terbatas dan sama akan tujuan hidup. Menurut Soebahar (2009) tujuan pendidikan merujuk pada capaian ideal yang ingin direalisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dimana Pendidikan itu dimulai dengan suatu tujuan, yang diasumsikan sebagai nilai. Menurut Kurshid yang dikutip oleh Rodliyah (2021: 36) pendidikan sendiri juga memiliki beberapa fungsi diantaranya ialah:

1. Pendidikan sebagai alat untuk menjaga, mengembangkan dan mengaitkan dengan tingkatan kebudayaan, nilai-nilai social dan kesukuan, serta cita-cita masyarakat dan negara.
2. Pendidikan sebagai alat untuk perubahan dan akselerasi perubahan sosial dan ekonomi dengan membangun SDM produktif berbasis pengetahuan dan peningkatan keahlian.

Dalam menjalankan aktivitas Pendidikan sekolah dan berbagai Lembaga Pendidikan memerlukan kurikulum untuk menunjang serta mendukung tujuan Pendidikan. Maka dari itu kurikulum menjadi komponen yang sangat penting dalam terlaksananya proses Pendidikan. Pada dasarnya kurikulum mempunyai fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi pesertanya. Kurikulum sendiri bagi peserta didik berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran (Baderiah, 2018:34).

Dalam sejarahnya kurikulum Pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan kurikulum ini bertujuan untuk menjadikan kurikulum menjadi lebih baik sesuai standar perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan kurikulum, diantaranya ialah Rentjana Pelajaran 1947, Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013 (K-13), dan Kurikulum Merdeka 2022 (Setiyorini 2). Tujuan dari perubahan kurikulum yaitu untuk mencapai sebuah model dan desain yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan kurikulum ini maka akan dibahas kurikulum Pendidikan di Indonesia dalam artikel penelitian ini.

B. METODE

Peneliti mengadopsi rancangan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur (*library research*) untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Menurut Mestika Zed (2008:3) studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi melalui bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah. Sedangkan dalam pandangan Mahmud (2011:31) metode ini merupakan cara mencari data atau informasi dengan meneliti bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa naskah, buku, majalah, maupun dokumen lainnya. Bisa disimpulkan studi kepustakaan adalah Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan meneliti bahan-bahan tertulis yang telah ada. Penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan berfokus pada kekayaan literatur untuk membangun landasan teori atau memecahkan masalah penelitian.

Proses teknik analisis data dengan mendeskripsikan fakta-fakta dari literatur, kemudian disusul dengan analisis yang memberikan pemahaman serta penjelasan yang cukup (Sugiyono: 89). Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi komponen kurikulum (tujuan, isi, metode, evaluasi) dengan tujuan menemukan letak "Inovasi" atau perubahan signifikan dari satu periode ke periode berikutnya. Peneliti menganalisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: penyaringan data (*data reduction*), pemetaan data (*data display*) melalui matriks perbandingan, serta perumusan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles & Huberman 1992:15-20).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Zaman Kolonial Belanda dan Jepang

Pada zaman kolonial Belanda sistem pendidikan di Indonesia memiliki tujuan seperti menyebarkan agama Kristen Protestan (terutama masa VOC) dan juga memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang murah untuk roda pemerintahan dan ekonomi pemerintah Belanda. Warga lokal memiliki akses yang sangat terbatas untuk merasakan mengenyam Pendidikan pada saat itu karena pemerintah Kolonial Belanda lebih memprioritaskan untuk anak-anak keturunan Eropa dan juga Tionghoa. Beberapa sekolah yang didirikan pada zaman Kolonial Belanda diantaranya ialah *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), *Europeesche Lagere School* (ELS), Sekolah Rakyat/Desa (*Volkschool*), dan *Hollandsch-Chineesche School* (HCS). Bahasa pengantar awalnya menggunakan bahasa Belanda, namun sejak tahun 1630 mulai diimbangi dengan bahasa Melayu klasik. Pada abad ke-19, penguasaan bahasa Belanda menjadi syarat utama di sekolah-sekolah pemerintah. (Djohan 1993: 9-34)

2. Kurikulum 1947, “Rentjana Pelajaran 1947”

Kurikulum perdana Indonesia pascakemerdekaan mengadopsi istilah Belanda *leer plan* artinya berarti rencana pelajaran. Munculnya kurikulum ini menandai pergeseran arah pendidikan dari orientasi kolonial menuju kepentingan nasional, dengan Pancasila sebagai landasannya. Meski disusun pada tahun 1947, kurikulum yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran 1947 ini baru resmi diimplementasikan pada tahun 1950. Karena situasi bangsa yang masih dalam masa transisi, struktur pengajarannya masih banyak mengadopsi sistem Belanda dan Jepang. Namun, fokus utamanya telah diubah menjadi pembentukan karakter manusia yang merdeka, berdaulat, dan setara dengan bangsa lain. Kurikulum ini lebih menitikberatkan pada pendidikan watak serta kesadaran bernegara dibandingkan sekadar aspek kognitif atau pemikiran (Ahmad Zainuri 2023: 9-10).

Pada masa itu, mata pelajaran dibagi menjadi beberapa kelompok utama yaitu: 1. Rumpun mata pelajaran bahasa mencakup Bahasa Indonesia serta Bahasa Daerah. 2. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan yang terdiri dari Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Hayat, dan Ilmu Alam.

3. Mata pelajaran Keterampilan/Seni yang terdiri dari Menggambar, Menulis, Seni Suara, dan Pekerjaan Tangan. 4. Mata pelajaran Kesehatan dan Jasmani yang terdiri dari Pendidikan Jasmani dan Kebersihan. 5. Mata pelajaran karakter yang terdiri dari Pendidikan Budi Pekerti dan Pendidikan Agama (Nasution 2006: 78-82). Kurikulum ini baru benar-benar dilaksanakan secara meluas pada tahun 1950, setelah masa revolusi fisik (perang kemerdekaan) mereda. Oleh karena itu, dalam banyak literatur, Rentjana Pelajaran 1947 sering disandingkan dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 (Djumhur & Danasuparta, 1976: 145).

3. Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Setelah implementasi Rencana Pelajaran 1947, sistem pendidikan Indonesia mengalami penyempurnaan melalui Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menjadi tonggak awal menuju sistem pendidikan nasional yang lebih terstruktur. Karakteristik utamanya terletak pada integrasi materi pembelajaran dengan realitas kehidupan masyarakat, di mana setiap topik bahasan wajib dikaitkan dengan aspek sosial di sekitarnya (Desi, 2025: 116).

4. Rentjana Pendidikan 1964

Diterbitkan di bawah naungan Demokrasi Terpimpin, Kurikulum 1964 merefleksikan spirit revolusioner dan ideologi politik yang dominan pada masanya. Fokus utama kurikulum ini adalah mencetak "manusia sosialis Indonesia" dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai prinsip Pancasila. Dalam konteks ini, sejarah tidak lagi diperlakukan sebagai disiplin ilmu yang netral, melainkan dialihfungsikan sebagai instrumen ideologis untuk memupuk kesadaran nasional.

Pada Kurikulum 1964 juga menitikberatkan pada pembekalan akademik bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki sekolah dasar. Fokus utamanya terletak pada konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan lima dimensi utama, meliputi kreativitas, afeksi, kemauan, karya nyata, dan etika. Dalam praktiknya, pendidikan dasar saat itu diarahkan pada penguasaan pengetahuan serta keterampilan fungsional yang selaras dengan tahap perkembangan anak, yang mencakup dimensi kecerdasan, emosional, moral, keterampilan, hingga kesehatan jasmani.

5. Kurikulum 1968

Penyempurnaan kurikulum pada tahun 1968 merefleksikan perubahan orientasi negara menuju implementasi UUD 1945 konsisten. Secara politis, Kurikulum 1968 dirancang untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dipandang sebagai bagian dari peninggalan rezim Orde Lama. Fokus utamanya terletak pada pengorganisasian materi yang terbagi ke dalam tiga aspek: pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, serta kecakapan khusus. Karakteristik Kurikulum 1968, sebagaimana dinyatakan oleh Raharjo (2020), terletak pada pendekatan yang digunakan cenderung abstrak serta kurang berorientasi pada konteks permasalahan praktis di lapangan. Dikatakan sebagai kurikulum "bulat" karena struktur materinya terbatas pada bidang-bidang inti, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus, dengan penekanan mendasar pada ketepatan alokasi materi untuk setiap tingkatan pendidikan.

Kurikulum 1968 memiliki keunggulan pada aspek sentralisasi prinsip pendidikan nasional yang tetap memberikan otonomi bagi sekolah dalam implementasinya sesuai kondisi daerah masing-masing. Kurikulum ini dikembangkan dengan semangat kemandirian, di mana guru memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola pembelajaran di kelas demi mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum ini memacu kreativitas dan daya saing antarwilayah serta sekolah, sekaligus membuka peluang luas bagi lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (Faisal, 2022: 288).

6. Kurikulum 1975

Implementasi Kurikulum 1975 berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Secara epistemologis, kurikulum ini diadopsi sebagai respons terhadap paradigma manajemen kontemporer pada masa itu, yakni *Management by Objective* (MBO). Pendekatan ini mengintegrasikan manajemen strategis ke dalam sistem pedagogis untuk memastikan setiap proses pembelajaran memiliki luaran yang terukur. Dalam operasionalisasinya, kurikulum ini menggunakan instrumen Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Seluruh komponen pembelajaran, mulai dari metode hingga materi, diformalisasikan ke dalam bentuk "Satuan Pelajaran", yang berfungsi sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap unit bahasan (Dini 2023: 203).

Pada kurikulum 1975 ini pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/10/1975, otoritas pendidikan secara resmi membentuk Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan. Secara fungsional, institusi ini diberikan mandat strategis untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut (Soedijarto 2010: 6-7):

- a. Meletakkan kerangka acuan primer bagi pengembangan kurikulum berkelanjutan serta kesetaraan mutu sarana dan prasarana di seluruh jenis serta jenjang satuan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Merumuskan program kerja yang sistematis dalam pengembangan kurikulum serta sarana dan prasarana, sekaligus menetapkan standar kualifikasi teknis yang disyaratkan untuk implementasi kegiatan pengembangan di lingkungan pendidikan.
- c. Melakukan pemantauan serta menjamin keamanan implementasi seluruh program pengembangan kurikulum dan infrastruktur yang dilakukan oleh berbagai unit perencanaan di bawah naungan Departemen.
- d. Menilai efektivitas dan validitas dari setiap kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan kurikulum maupun sarana pendidikan, baik yang dikelola secara internal maupun yang dilaksanakan oleh unit sektoral lainnya di lingkungan Departemen.

Meskipun menawarkan kerangka kerja yang sangat terstruktur, Kurikulum 1975 menuai berbagai kritik dari kalangan praktisi pendidikan. Kendala utama terletak pada aspek birokratisme administratif; tenaga pendidik cenderung terbebani oleh kewajiban dokumentasi yang sangat mendetail mengenai sasaran instruksional. Hal ini dinilai mereduksi peran substansial guru karena waktu dan energi mereka banyak teralokasi pada aktivitas administratif dibandingkan pengembangan kualitas interaksi di dalam kelas.

7. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai upaya komprehensif dalam menyempurnakan kerangka kerja Kurikulum 1975 melalui pengintegrasian pendekatan proses. Meskipun fokus orientasi beralih pada dinamika pembelajaran, kurikulum ini tetap mempertahankan signansi sasaran instruksional (tujuan) sebagai parameter keberhasilan. Dalam literatur pendidikan, kurikulum ini sering kali diidentifikasi sebagai "Kurikulum 1975 yang Disempurnakan", yang merepresentasikan kesinambungan paradigma antara efisiensi manajemen dan aktivitas procedural (Lia Anitasari 2023: 96).

Kurikulum 1984 dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia mengungkap beberapa karakteristik fundamental yang menitikberatkan pada optimalisasi proses instruksional. Secara teoretis, kurikulum ini memiliki karakteristik sebagai berikut (Bayu Ananto 2023: 425-426):

- a. Kurikulum ini didesain dengan orientasi pada tujuan instruksional yang ketat. Paradigma yang mendasarinya adalah urgensi efektivitas waktu; keterbatasan durasi

belajar di sekolah menuntut pemberian pengalaman belajar yang benar-benar fungsional dan aplikatif bagi peserta didik.

- b. Implementasi pengajaran bertransformasi menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa melalui metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pendekatan ini memfasilitasi keterlibatan holistik siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Tujuannya adalah pencapaian pengalaman belajar yang komprehensif pada tiga ranah utama: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- c. Materi ajar diorganisasikan menggunakan pendekatan spiral, yakni teknik pengemasan bahan ajar yang memperhatikan gradasi kedalaman dan keluasan konten. Dalam model ini, konsep-konsep kunci diajarkan secara berulang dengan tingkat kompleksitas yang terus meningkat seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan.
- d. Kurikulum ini menekankan pada internalisasi pemahaman konseptual sebelum peserta didik diberikan latihan soal (*drill*). Untuk memvalidasi pemahaman tersebut, penggunaan alat peraga media ini sangat cocok dipakai untuk menghubungkan ide-ide abstrak agar terasa lebih nyata dan gampang dipahami siswa.
- e. Guru menyajikan materi pelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan mental siswa, yang menjadi perhatian khusus pada jenjang sekolah dasar melalui transformasi materi mengikuti alur perkembangan kognitif dari tahap konkret, semikonkret, semiabstrak, hingga abstrak.
- f. Aspek metodologi pada kurikulum ini mengintegrasikan pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini memberikan penekanan signifikan pada aktivitas penemuan pengetahuan, mulai dari proses pembentukan keterampilan untuk memperoleh data hingga kemampuan dalam mengomunikasikan hasil perolehan pengetahuan tersebut secara ilmiah.

8. Kurikulum 1994

Penyusunan Kurikulum 1994 merupakan upaya sinkronisasi sistematis terhadap amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta regulasi turunan lainnya. Tim pengembang kurikulum melakukan restrukturisasi dengan mengacu pada kerangka legal-formal yang ditetapkan oleh pemerintah guna menjamin relevansi pendidikan nasional. Kurikulum 1994 secara fundamental mengadopsi paradigma *Link and Match*, sebuah orientasi filosofis yang menekankan pada sinkronisasi antara luaran lembaga pendidikan dengan kebutuhan sektoral dunia kerja dan industri. Kebijakan ini memosisikan institusi pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terampil (*skilled labor*) yang secara fungsional harus selaras dengan tuntutan pasar. Secara struktural, kurikulum ini menuntut adanya sinergi kolaboratif antara sektor usaha dan lembaga formal guna memastikan relevansi kompetensi lulusan (Dini Febriyenti: 204).

9. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menitikberatkan pada pengembangan kemampuan praktis siswa sesuai indikator pencapaian tertentu, sehingga penguasaan kompetensi akan dirasakan langsung oleh seluruh peserta didik. Dalam implementasinya, KBK memandang proses dan hasil pembelajaran sebagai elemen yang setara dan saling melengkapi. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan dampak nyata menerapkan pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman dan berbobot secara kognitif maupun emosional. Selain itu, prinsip KBK bersifat dinamis terus dikembangkan dan disempurnakan agar selaras dengan kemajuan IPTEK serta kebutuhan masyarakat.

Struktur dasar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tersusun atas empat elemen utama, yakni (Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas 2002: 3-4):

- a. Struktur Pembelajaran dan Hasil Belajar. Elemen ini merancang peta pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh bagi rentang usia 0 hingga 18 tahun. Dokumen ini mencakup standar kompetensi, capaian pembelajaran, serta indikator penilaian yang dimulai dari jenjang PAUD (TK/RA) hingga SMA (Kelas XII).
- b. Penilaian Berbasis Kelas. Fokus utama elemen ini adalah menciptakan penilaian yang konsisten melalui identifikasi kompetensi dan standarisasi hasil belajar. Dengan memetakan kemajuan siswa secara kontinu, sistem ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban publik yang menggambarkan efektivitas pembelajaran secara faktual.
- c. Kegiatan Belajar Mengajar. Elemen ini tidak hanya fokus pada pencapaian kompetensi melalui materi inti, tetapi juga menggunakan metode pedagogi dan andragogi. Tujuannya adalah agar suasana belajar tetap hidup, fleksibel, dan tidak sekadar menjalankan rutinitas yang menjemukan.
- d. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah. Melalui elemen ini, berbagai sumber daya dan tenaga kependidikan diberdayakan untuk mencapai mutu belajar yang lebih baik. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan *curriculum council*, pengembangan silabus, pembinaan profesi guru, serta penguatan sistem informasi kurikulum.

10. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dibuat secara variatif dengan berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. SNP sendiri mencakup delapan aspek utama: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Di antara seluruh standar tersebut, Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi pilar utama bagi sekolah dalam menyusun kurikulum mereka. Penyusunan KTSP dilaksanakan secara otonom oleh masing-masing sekolah melalui pendampingan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama, di mana jenjang dasar disupervisi oleh tingkat kabupaten/kota, sedangkan jenjang menengah dan khusus oleh tingkat provinsi. Proses ini wajib mengacu pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan dari BSNP, dengan tetap melibatkan pertimbangan dari komite sekolah (Badan Standar Nasional Pendidikan 2006: 3-5).

Dalam menyusun KTSP, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merujuk pada beberapa prinsip dasar sebagai berikut (Mukni'ah 2016: 40-42)

- a. Berorientasi penuh pada potensi, pertumbuhan, prioritas, serta kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Memiliki keberagaman aspek yang saling terintegrasi secara padu.
- c. Adaptif dan peka terhadap kemajuan sains, teknologi, serta seni.
- d. Memiliki keterkaitan erat dengan dinamika dan tuntutan kehidupan nyata.
- e. Bersifat holistik, utuh, serta berlanjut secara berkal.
- f. Mendorong proses pembelajaran secara berkelanjutan tanpa batas usia.
- g. Memelihara keselarasan antara aspirasi tingkat nasional dan daerah.

Sejak disahkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, kurikulum ini mulai diterapkan dengan regulasi turunan PP No. 10 Tahun 2003. Perbedaan utamanya dengan KBK 2004 terletak pada fleksibilitasnya; pemerintah hanya menentukan standar kompetensi dasar, sementara tenaga pendidik berhak mengembangkan materi ajar yang relevan dengan kondisi siswa dan daerah masing-masing (Desi: 119).

11. Kurikulum 2013 (K-13)

Penerapan Kurikulum 2013 berfokus pada penguatan pendidikan karakter guna mengoptimalkan mutu serta output pembelajaran. Tujuannya adalah membentuk kepribadian

dan akhlak mulia peserta didik secara integratif dan harmonis, sejalan dengan standar kompetensi lulusan di setiap jenjang Pendidikan (E. Mulyasa 2015: 7). Pemerintah meluncurkan Kurikulum 2013 guna membekali bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masa depan. Kebijakan ini menekankan pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keterampilan praktis, bukan sekadar mengejar ketuntasan materi pengetahuan atau kognitif saja (Mukni'ah: 46).

Sebagaimana kurikulum pada umumnya yang memiliki ciri khas tersendiri, Kurikulum 2013 hasil rancangan pemerintah pun demikian. Karakteristik dari Kurikulum 2013 tersebut dipaparkan sebagai berikut (Desti Nurholis 2022: 102):

- a. Menyelaraskan pertumbuhan karakter spiritual dan sosial, daya kritis, serta kreativitas dengan pengembangan kecerdasan intelektual dan keterampilan fisik.
- b. Memposisikan sekolah sebagai laboratorium sosial di mana siswa mempraktikkan teori ke dunia nyata, sekaligus menjadikan lingkungan masyarakat sebagai literasi belajar yang hidup.
- c. Mengasah perilaku, wawasan, dan keahlian agar dapat diimplementasikan secara adaptif baik di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial.
- d. Menyediakan durasi yang proporsional demi pendalaman karakter, pemahaman materi, dan penguasaan keterampilan secara optimal.
- e. Menjabarkan tujuan pembelajaran dari standar umum (Kompetensi Inti) ke dalam rincian yang lebih spesifik pada setiap mata pelajaran (Kompetensi Dasar).
- f. Menjadikan Kompetensi Inti sebagai poros utama dalam menyusun materi dan metode pengajaran, sehingga seluruh aktivitas belajar berfokus pada pencapaian standar tersebut.
- g. Menyusun materi pelajaran secara berkesinambungan dan saling mendukung antar mata pelajaran maupun antar tingkatan kelas (secara horizontal dan vertikal) untuk memperkuat pemahaman siswa.

Keberagaman karakteristik kompetensi serta perbedaan alur perolehannya secara determinan memengaruhi Standar Proses pembelajaran. Guna mengoptimalkan pendekatan saintifik, tematik terpadu, maupun tematik monodisplin, diperlukan implementasi model pembelajaran berbasis penyingkapan (*Discovery or Inquiry Learning*). Selain itu, untuk menstimulasi kapabilitas peserta didik dalam menghasilkan artefak atau karya kontekstual baik secara mandiri maupun kolaboratif rekomendasi metodologis diarahkan pada penggunaan *Project-Based Learning* (PjBL). Model ini memfasilitasi pengembangan solusi atas problematik nyata melalui proses pemecahan masalah yang sistematis.

12. Kurikulum Merdeka 2022

Perancangan Kurikulum Merdeka berpijak pada evaluasi kurikulum terdahulu serta landasan pengembangan yang kuat. Meski terdapat banyak teori desain instruksional, Kurikulum Merdeka menyederhanakannya menjadi tiga prinsip utama demi kemudahan implementasi: fokus pada kompetensi dan karakter, fleksibilitas, serta penekanan pada materi esensial. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengartikan Kurikulum Merdeka sebagai sistem belajar yang berbasis pada pengembangan potensi unik setiap individu. Di sini, pelajar diberikan ruang untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan hobi atau bakatnya. Program ini sendiri diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek guna membenahi dan memperbaiki struktur yang ada pada Kurikulum 2013 sebelumnya. Pemerintah meluncurkan Kurikulum Prototipe sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keterampilan generasi penerus. Dengan menyederhanakan struktur Kurikulum 2013 dan mengedepankan sistem berbasis proyek, model ini mulai diuji coba pada 2.500 institusi pendidikan sejak awal pandemi COVID-19. Penelitian mengungkapkan fakta menarik bahwa efektivitas pembelajaran dengan kurikulum

ini melampaui Kurikulum 2013, di mana siswa mampu berkembang empat hingga lima bulan lebih awal dari standar biasanya (Zainuri 2023: 1).

Orientasi utama Kurikulum Merdeka adalah menjadikan penilaian sebagai elemen inti yang menyatu dengan strategi pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui evaluasi yang dilakukan secara simultan, mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah proses belajar mengajar dalam rentang waktu tertentu. Adapun empat karakteristik pembelajarannya meliputi:

- a. Menggunakan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif secara optimal guna memetakan karakteristik serta memantau progres pemahaman peserta didik.
- b. Melakukan penyesuaian strategi pembelajaran berbasis pemahaman terhadap kebutuhan serta karakteristik peserta didik.
- c. Mengedepankan kualitas dan peningkatan kompetensi siswa dibanding sekadar penuntasan cakupan muatan kurikulum.
- d. Disusun melalui kegiatan refleksi terhadap perkembangan belajar peserta didik yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim pendidik.

Esensi Kurikulum Merdeka terletak pada fungsi asesmen sebagai dasar pengambilan keputusan instruksional. Penilaian bukan hanya alat evaluasi akhir, melainkan instrumen untuk memahami posisi peserta didik, melakukan penyesuaian strategi mengajar, dan memprioritaskan pertumbuhan kompetensi siswa di atas target cakupan kurikulum. Strategi Merdeka Belajar bertumpu pada empat pilar kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Adapun keempat kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan USBN kini bertransformasi menjadi ujian yang dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah. Institusi pendidikan memiliki fleksibilitas dalam menentukan metode penilaian, baik melalui tes tertulis, ujian lisan, penyusunan karya tulis, maupun penilaian portofolio. Otonomi ini memberikan wewenang penuh kepada sekolah untuk menyusun kebijakan evaluasi yang relevan dalam mendukung perkembangan kognitif siswa.
- b. Pergeseran orientasi Ujian Nasional (UN) menuju Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter menekankan tiga domain utama, yaitu literasi membaca, kemampuan numerasi, dan penanaman nilai-nilai karakter. Evaluasi ini sengaja ditempatkan di pertengahan jenjang studi (kelas 4, 8, dan 11) guna memberikan umpan balik instruksional bagi guru dalam mengoptimalkan kualitas proses belajar-mengajar sebelum peserta didik menyelesaikan tingkat pendidikannya.
- c. Penyederhanaan RPP oleh Kemendikbud membebaskan guru untuk menyusun dan mengembangkan format secara mandiri. Meskipun komponennya dipangkas, RPP tetap mengacu pada tiga bagian inti, mencakup capaian pembelajaran, proses interaksi instruksional, serta evaluasi hasil belajar.
- d. Transformasi peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terlihat pada pengaturan komposisi jalurnya, yang menetapkan kuota minimal 50% untuk jalur zonasi, 15% untuk afirmasi, serta maksimal 5% bagi jalur perpindahan tugas orang tua. Sementara itu, sisa kuota sebesar 0–30% dialokasikan untuk jalur prestasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Fleksibilitas otonomi ini diberikan kepada setiap daerah guna menyelaraskan kebijakan lokal dengan upaya pemerataan kualitas peserta didik maupun tenaga pendidik.

Dalam implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, guru dapat menggunakan modul ajar sebagai alternatif RPP yang lebih komprehensif. Perbedaannya terletak pada kelengkapan materi, seperti adanya lembar kegiatan dan asesmen yang memungkinkan pembelajaran lebih variatif dibandingkan penggunaan buku teks konvensional. Modul ini dapat disusun secara mandiri oleh guru atau praktisi pendidikan lainnya. Tujuannya adalah menciptakan

pembelajaran yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sehingga setiap siswa dapat mencapai kompetensi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Penerapan Kurikulum Merdeka merupakan langkah transformatif pemerintah Indonesia untuk memulihkan pembelajaran pascapandemi serta menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada satuan Pendidikan baik sekolah maupun madrasah untuk menyusun kurikulum operasional yang relevan dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan unik peserta didik. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Merdeka menitikberatkan pada penyederhanaan materi (materi esensial) dan fleksibilitas metode pengajaran demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Berikut penjelasan implementasi kurikulum di sekolah dan madrasah (Kemenag, 2022):

a. Kurikulum Merdeka di Sekolah

Kurikulum Merdeka di sekolah hadir sebagai solusi pemulihan pembelajaran melalui fokus pada materi esensial dan fleksibilitas metode, seperti pembelajaran berbasis proyek dan berdiferensiasi. Dengan memberikan kemerdekaan penuh dalam proses perencanaan hingga evaluasi, kurikulum ini memungkinkan setiap satuan pendidikan untuk beradaptasi secara bertahap demi memastikan setiap siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan.

b. Kurikulum Merdeka di Madrasah

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah merupakan bentuk adaptasi kebijakan Kemendikbudristek yang tetap mempertahankan ciri khas pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Melalui kemandirian satuan pendidikan dan dukungan berbagai panduan teknis dari Kementerian Agama, kurikulum ini diharapkan mampu menciptakan perbaikan kualitas pembelajaran yang kontekstual dan berkualitas di madrasah. Secara keseluruhan transisi madrasah menuju Kurikulum Merdeka bukan sekadar perubahan dokumen, melainkan sebuah prosedur terintegrasi. Proses ini menuntut proaktifitas madrasah dalam menyiapkan sumber daya manusia dan sarana, yang kemudian disahkan melalui mekanisme administratif formal. Penetapan madrasah sebagai pelaksana IKM hanyalah titik awal, yang selanjutnya harus diikuti dengan pembinaan berkelanjutan dan evaluasi berkala demi tercapainya efisiensi pembelajaran dan peningkatan kualitas madrasah.

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama tiga tahun pelajaran. Dimulai dari piloting terbatas pada kelas-kelas awal di tahun 2022/2023, transisi ini ditargetkan mencapai implementasi penuh untuk seluruh jenjang dan usia peserta didik pada tahun pelajaran 2024/2025. Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di madrasah memberikan otonomi luas bagi satuan pendidikan untuk berinovasi sesuai potensi lokal dengan tetap menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ruh pendidikan. Integrasi ini diwujudkan melalui pembagian muatan kurikulum (agama dan umum) serta alur pembelajaran terselenggara secara berkesinambungan, mencakup perencanaan matang melalui RPP, proses belajar yang aktif dan sarat nilai religius, serta evaluasi yang objektif. Tujuannya adalah mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara kognitif dan kompetitif di kancah internasional, tetapi juga memiliki karakter akhlakul karimah yang kuat (Rohmad 2024: 100-112).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai model-model inovasi kurikulum di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama dimana dinamika Inovasi Kurikulum di IndoneKurikulum di Indonesia merupakan instrumen pendidikan yang bersifat dinamis dan terus bertransformasi demi menjawab tantangan zaman, mulai dari era kolonial hingga era digital. Perubahan ini bergerak dari orientasi yang bersifat indoktrinatif pada masa penjajahan menuju orientasi pembentukan karakter bangsa (*nation building*)

pascakemerdekaan, hingga kini berfokus pada pengembangan kompetensi global dan karakter profil pelajar Pancasila. Setiap periode kurikulum memiliki karakteristik unik yang merefleksikan kebutuhan pada masanya, seperti kurikulum awal (1947–1968) berfokus pada pembentukan karakter manusia merdeka, berdaulat, dan penguatan ideologi Pancasila. Kurikulum berorientasi Tujuan & Proses (1975–1994) menekankan efisiensi melalui *Management by Objective* (MBO), pendekatan spiral dalam materi, serta konsep *Link and Match* untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja. Kurikulum Berbasis Kompetensi & KTSP (2004–2006): Menitikberatkan pada kemampuan praktis siswa dan memberikan kewenangan penuh kepada lembaga pendidikan untuk menyusun kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal. Kurikulum 2013 mengintegrasikan nilai karakter, literasi, serta mengasah keterampilan menggunakan pendekatan saintifik yang dipadukan dengan model *Project-Based Learning* (PjBL). Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi pemulihan pembelajaran pascapandemi dengan prinsip fleksibilitas dan fokus pada materi esensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). Kurikulum dan pola ilmu pengetahuan pada masa orde lama dan orde baru. *Social Science Academic*, 1(2), 93-98.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP). (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
- Baderiah. (2018). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. Palopo: IAIN Palopo Kampus Utama Area Bintaro.
- Danasuparta (1976), *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Ilmu.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. RI. (tt). *Kurikulum Pendidikan Dasar (atau Kurikulum Sekolah Menengah Umum) 1994: Landasan, Program, dan Pengembangan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kerangka Dasar* (pp. 3-4). Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Febriyenti, D., Putri, N., Asmendra, A., & Sari, M. (2023). Perkembangan kurikulum di Indonesia dalam perspektif sejarah. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 195-214.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM)*. Jakarta: Ditjen Pendis Kemenag.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, S. (2006). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudyahardjo, P. D. (2006). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mukni'ah. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. (2015). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan kurikulum 2013. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 98-114.
- Putri, D. S., Marzelni, M., Delastri, Y., Anggraini, D., Demina, D., & Darmansyah, D. (2025). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. D), 111-122.

- Raharjo, R. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1947 sampai dengan merdeka belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63-82.
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). Komparasi kurikulum 1964 dan 1968 serta kajian materi geografi pada jenjang smp. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 9(1), 278-290.
- Rodliyah. (2021). *Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Jember: UIN KHAS Jember Press.
- Rohmad, A., Muawanah, E., Ju'subaidi, J. S., & Hidayah, N. (2024). The role of curriculum implementation and principal leadership in enhancing academic performance in Islamic boarding schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 15(4), 338-373.
- Soebahar, A. H. (2009). *Matrik Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Soedijarto. (2010). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli & Perubahan/Amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
- Zainuri, A. (2023). *Manajemen Kurikulum Merdeka*. Bengkulu: Literasiologi.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.